

Cegah Longsor, Pemkot Bogor akan Tertibkan Bangunan di Tebing Jl Cilebut

BOGOR (IM)- Jl Raya Cilebut di tebing jurang kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor, rawan longsor. Pemukiman-pemukiman di titik rawan longsor bakal ditata ulang demi mencegah bahaya yang berpotensi terjadi.

"Intinya secara bertahap kita perbaikan terus, termasuk kita akan tata ulang permukiman liar di sepanjang tebing Jl Cilebut," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Jumat (29/1).

Tebing jurang rawan longsor itu berada di sekitar RT 01/RW 03 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, warga setempat menyebutnya sebagai Jembatan Dua. Di tepian jurang, terdapat puing bangunan sisa longsor. Kawasan ini memang pernah mengalami longsor sebelumnya.

"Kita sedang menyiapkan penertiban di sepanjang jalan tersebut untuk menekan risiko semakin tergerusnya tebing karena pembangunan ilegal dan bisa mengakibatkan longsor lebih parah sehingga masyarakat luas yang dirugikan," kata Dedie.

Pemkot Bogor akan membangun Tembok Penguat Tanah (TPT) dengan memakai anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sebesar Rp 900 juta. Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai

Ciliwung Cisadane (BBWSCC). "Ada beberapa permasalahan yang dikordinasikan juga dengan Provinsi termasuk BBWSCC," kata Dedie.

Warga sekitar tebing jurang di Jl Raya Cilebut berharap tebing itu diperkuat. Warga tidak ingin ada korban jiwa gara-gara antipaksi kurang cepat. Lokasi tersebut juga pernah longsor namun belum juga ditangani.

"Harapan saya ya dipercepat lah, dari pemerintah ini yang berkecimpung di bidang ini ya agar segera diapa gitu, diturap apa dicor, biar aman. Karena ini kan jalannya juga cukup ramai disini non stop 24 jam jalan rayanya ini," kata warga setempat bernama Firdaus, saat ditemui di lokasi itu, Selasa (26/1) kemarin.

Pada siang hari, lalu lintas di ruas jalan ini ramai. Saking ramainya, tidak terlalu mudah untuk menyeberang jalan ini. Sepeda motor hingga mobil pribadi dan angkutan umum lewat jalan ini. Jalan Cilebut punya lebar sekitar 3,5 meter. Terlihat lebar jalan hanya bisa menampung dua mobil berukuran sedang.

Jl Raya Cilebut menjadi salah satu pilihan warga untuk menuju Kota Bogor. Selain jalan ini, ada Jl Ahmad Yani yang menjadi akses utama menuju Kota Bogor. ● **gio**

Waspada! Pantai Selatan Jabar Berpotensi Tsunami Tinggi Bila Terjadi Gempa

BANDUNG (IM)- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di sekitar laut selatan Jawa Barat agar waspada terhadap potensi bahaya tsunami. Kendati belum bisa diprediksi kapan bencana tersebut terjadi, namun masyarakat tetap waspada bila sewaktu-waktu bencana datang.

Menurut Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hendro Nugroho, hampir semua pantai selatan Jawa Barat mempunyai potensi diterjang tsunami sangat tinggi, bila terjadi gempa bumi di kedalaman laut. Potensi tsunami terjadi lantaran laut selatan berhadapan dengan subduksi.

"Ini karena laut selatan Jabar berhadapan langsung dengan subduksi, mulai dari Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Selatan Cianjur, Pantai Selatan Garut, Pantai Selatan Tasikmalaya hingga Pangandaran," jelas Hendro.

Dari informasi yang dihimpun, subduksi adalah proses geologi, di mana kerak bumi terdapat pada batas dua lempeng tektonik litosfer. Lempeng dengan kerak samudra

yang lebih tipis menunjat ke bawah, sementara lempeng yang dengan kerak benua yang lebih tebal secara konvergen. Kerak samudra biasanya tenggelam ke dalam, di bawah kerak benua yang lebih ringan.

Sementara Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Teguh Rahayu mengatakan, belum ada penelitian yang bisa memprediksi kapan subduksi tersebut akan aktif dan menimbulkan tsunami. Namun sebagai contoh, subduksi tersebut pernah menyebabkan bencana tsunami di Pantai Pangandaran pada tahun 2005.

"Saat itu tinggi gelombang tsunami mencapai 7 meter. Tapi kalau terjadi gempa hingga magnitudo 8 SR, diprediksi bisa menyebabkan tsunami antara 12 hingga 15 meter," beber dia.

Sebagai langkah antisipasi, kata dia, pihaknya selalu berkoordinasi dengan wilayah yang berpotensi berdampak tsunami. Masyarakat dan pemerintah daerah, agar meningkatkan kewaspadaan. Mereka harus aware atas potensi bencana yang mungkin timbul di daerahnya.

● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PEMBERSIHAN RERUNTUHAN RUMAH PASCAGEMPA MAMUJU

Sejumlah warga mencari sisa barang di reruntuhan bangunan di Mamuju Sulawesi Barat, Jumat (29/1). Memasuki dua pekan pascagempa bumi BNPB merilis jumlah kerusakan rumah sebanyak 7.863 unit, Mamuju 3.741 dan Majene 4.122 unit.

DIDUGA DISEROBOT ORANG

Ribuan Bidang Tanah Aset Pemkab Bogor Belum Tersertifikasi

Bupati Bogor, Ade Yasin telah mengajukan permohonan 3.000 sertifikat lahan aset daerah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Ini kemudian akan diselesaikan secara bertahap. "Harus disertifikatkan. Supaya tidak ada konflik di kemudian hari," katanya.

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten Bogor mengklaim memiliki ribuan aset yang diduga diserobot

orang lain. Dari sekitar 3.000 bidang tanah aset milik daerah, baru sekitar 700 yang tersertifikasi.

Bupati Ade Yasin mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan 3.000 sertifikat lahan aset daerah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Ini kemudian akan diselesaikan secara bertahap.

"Harus disertifikatkan. Supaya tidak ada konflik di kemudian hari. Kalau sudah selesai, jauh dari masalah sengketa

nantinya," kata Ade Yasin, Jumat (29/1).

Dia berharap, dalam masa pandemi Covid-19 ini, sedikitnya 500 aset daerah tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Meskipun, jumlah itu masih jauh dari target yang ditetapkan. "Targetnya kan 3.000 bidang. Ini bertahap diselesaikan nanti oleh BPN. Tahun ini mudah-mudahan ada 500 bidang yang tersertifikasi," jelas politisi PPP itu.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sepyo

Achanto mengaku mengalami beberapa kendala dalam melakukan sertifikasi aset. Seperti aset yang dikuasai pihak lain. Ini memerlukan penanganan khusus dan memakan waktu cukup lama meski masalah seperti ini hanya sebagian kecil.

Dia tetap optimis bisa menerbitkan 500 sertifikat aset Pemkab Bogor tahun ini. "Optimis lah bisa tercapai. Sesuai yang sudah disepakati bersama Pemkab Bogor," kata Sepyo. ● **gio**

DPRD Kab Bogor Sesalkan Banyak Pembangunan Mangkrak

CIBINONG (IM)- Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyesalkan banyak proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat tak selesai pada tahun 2020.

"Ada alasan tidak selesai karena ada pandemi Covid-19. Mestinya hal tersebut sudah disiasati sejak awal, karena pandemi sudah terjadi

sebelum pekerjaan dimulai," ungkap Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Andi Permana di Cibinong, kemarin.

Sebagian penyedia jasa yang ditanya langsung oleh Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, kata politikus Partai Gerindra itu, juga berkilah ada hambatan suplai material proyek yang membuat pekerjaan tidak selesai tepat waktu.

Menurut Andi, cuaca di

Kabupaten Bogor pada tahun 2020 relatif baik sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di lapangan.

"Banyak proyek tidak selesai karena kelemahan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dalam perencanaan, pengawasan, dan juga saat menentukan pemenang tender. Ini harus menjadi bahan evaluasi," beber Andi.

Ia menyebutkan beberapa

proyek pembangunan infrastruktur yang tidak selesai dan melan anggaran cukup besar, seperti RSUD Ciawi senilai Rp70 miliar, Jembatan Arca 1 Desa Sukawangi Rp2,9 miliar, Jalan Sukawangi-Tanjungsari Rp20 miliar, Jembatan Kalibaru 2 Rp8 miliar, dan Rest Area Gunung Mas Rp4,5 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Soebiantoro mengakui ada 20 proyek APBD 2020 belum

selesai.

Proyek tersebut dikerjakan hingga 50 hari sepanjang 2021 dan harus selesai. Selama itu pula, kontraktor penyedia jasa diharuskan membayar denda sebesar satu per mil atau 0,1 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

"Saat ini sudah berjalan, dan diberikan kelonggaran waktu 50 hari kalender," kata pria yang akrab disapa Bibin itu. ● **gio**



IDN/ANTARA

PRODUKSI PERAHU NELAYAN DARI DRUM BEKAS

Perajin menyelesaikan proses pembuatan perahu nelayan berbahan dasar drum plastik bekas di Desa Teupin Perahu, Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat, Aceh, Jumat (29/1). Perajin tersebut bisa memproduksi 5-8 perahu yang dipasarkan ke berbagai daerah di Aceh dengan harga Rp2,5 juta sampai Rp5,5 juta per unitnya.

BELI BUBUR UNTUK PELANGGAN

Pengemudi Ojek Online Dihipnotis, Motornya Dibawa Kabur

TANGSEL (IM)- INH (22), pengemudi ojek daring asal Pondok Aren, Tangerang Selatan, tak menyangka sepeda motor yang jadi mata pencahariannya raib dibawa orang tidak dikenal. Dia menjadi korban hipnotis saat membelikan bubur ayam pesanan pelanggan di Jalan Raya Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan.

Ditemui di Mapolsek Pondok Aren, lelaki yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi ojek daring itu, mengaku tak sadar menuruti setiap keinginan orang yang tidak dikenalnya hingga menyerahkan sepeda motornya kepada pelaku. Dan memang saya dihipnotis," ucapnya.

"Kejadiannya saat saya mau membeli bubur pakai motor kakak saya yang biasa kita gunakan ngojek bergantian. Saya didekati dua orang satu di antaranya menepuk pundak saya dari belakang," jelas INH di Mapolsek Pondok Aren, Jumat (29/1).

Seketika, INH diajak mengobrol oleh pelaku dan ditanyakan pelaku mengenai kondisi orang tuanya. Dalam kondisi

terhipnotis korban kemudian diajak pelaku ke suatu tempat.

"Saya naik motor Yamaha N Max B 6034 VSY diminta mengikuti pelaku ke Perumahan Pondok Pucung Indah II. Di sana, salah satu pelaku bilang ingin meminjam sepeda motor saya. Terus saya kasih saja. Setelah beberapa lama saya sadar motor itu dicuri," jelasnya.

Setelah sadar menjadi korban hipnotis, INH pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya. Dan membuat laporan Polisi. "Sadar-sadar motor sudah hilang, saya sempat tunggu lama. Dan memang saya dihipnotis," ucapnya.

Kanit Reskrim Polsek Pondok Aren, AKP Sumiran mengakui telah menerima laporan tindak pidana pencurian dengan motif gendam. "Iya, dalam penyelidikan. Kita sudah panggil saksi-saksi untuk diperiksa dan diminta klarifikasi. Habis Jumat saksi-saksi sudah dipanggil, baru satu saksi yang di BAP dan siang ini datang lagi saksi-saksi," terang Sumiran. ● **pp**

Kang Emil Cari 5.000 Anak Muda Jadi Petani

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tengah mencari 5.000 anak muda untuk tinggal di desa dan menjadi petani 4.0. Sejumlah keuntungan ditawarkan seperti pinjaman modal, pinjaman lahan, dan pilihan untuk menikah kembang desa.

Program ini merupakan program untuk mengembangkan produk pertanian sehingga tidak lagi mencari pekerjaan di kota.

"DICARI 5000 ANAK MUDA JAWA BARAT YANG MAU BELA NEGARA DENGAN MENJADI PETANI 4.0. Daripada ganggur dan banyak rebahan melamun karena covid, mending gabung aja," tulis Ridwan Kamil di akun Instagram miliknya, Kamis (28/1).

Ia menambahkan, tiap petani milenial yang terpilih bakal mendapat pinjaman lahan seluas 2.000 meter persegi dari Pemprov Jabar. Ia menjamin lahan yang akan dipinjamkan memiliki tanah yang subur.

Para petani milenial juga akan diberi pinjaman modal

dari Bank Jabar. "Tanah subur masing-masing dipinjamkan 2000 m2 dari pemprov. Modal dari @bankbjb dan hasil langsung di beli oleh @agrojabarofficial" tulisnya lagi.

Pendaftaran program ini akan dibuka pekan depan. Anak muda yang terpilih masuk di program ini diminta untuk tinggal di desa tempat mereka bertani.

"Daripada jadi pengangguran kan? Salah satu syaratnya mau tinggal ngekos di desa. Menikahi kembang desa adalah pilihan," kata Ridwan Kamil.

Sebelumnya dilansir AntaraNews, Ridwan Kamil menuturkan Indonesia khususnya di Jabar membutuhkan petani muda agar sektor pertanian terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Upaya mewujudkan petani muda maka Pemerintah Provinsi Jabar menyediakan lahan yang diperbolehkan petani milenial untuk menggarapnya dan menjadi sumber penghasilan yang lebih baik

daripada di kota.

"Syaratnya mau berkerin-gat, dan syarat wajib tinggal di desa, jangan ingin programnya tapi tinggal di kota," kata pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu.

Ia menyampaikan petani milenial itu hanya cukup bekerja menanam dan merawat tanamannya agar tumbuh baik, kemudian diberi pinjaman modal, lalu hasil pertaniannya akan dibeli oleh PT Agro Jabar.

"Tanah dikasih, modal dikasih, hasil dibeli, sudah senang-enaknya hidup, tinggal hidup mau kerja saja," katanya.

Ia mengungkapkan rencananya Pemprov Jabar menyiapkan lahan 4 ribu hektare di Kabupaten Subang yang siap digunakan untuk petani milenial.

Ia berharap program itu mendapat dukungan dari pemerintah daerah untuk menciptakan swasembada pangan di Jabar. "Saya tidak melihat alasan tidak berhasil, sampai suatu hari tinggal di desa itu keren," katanya. ● **pur**



IDN/ANTARA

KELURAHAN SADAR KERUKUNAN DI JAMBI

Umat Kristiani membersihkan halaman Gereja Pantekosta di Indonesia yang berdampingan dengan rumah warga Tionghoa di Sungai Nibung, Tungkal Ilir, Tanjungabung Barat, Jambi, Jumat (29/1). Kelurahan Sungai Nibung di kabupaten pesisir timur provinsi itu merupakan Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan Provinsi Jambi 2018 yang memiliki tiga rumah ibadah (gereja, kelenteng, dan masjid) yang dibangun hampir berdekatan di perkampungan Jalan Lintas Jambi-Kuala Tungkal.

KRU DAN PENANGGUNG JAWAB DITEGUR

Bupati Bogor Minta Warga tak Tonton Syuting Ikatan Cinta

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten Bogor memberi solusi agar proses syuting sinetron Ikatan Cinta, tidak ditutup atau dihentikan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Agus Ridho menjelaskan, solusi yang diberikan adalah, proses syuting harus bisa menghindari adanya kerumunan. "Yang jadi persoalan kan, banyak yang nonton proses syutingnya karena masyarakat penasaran dengan pemeran dalam sinetron itu," kata Agus, Jumat (29/1).

Agus pun mengimbau masyarakat, tidak perlu berbondong-bondong menonton proses syuting sinetron yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo itu.

Dia mengungkapkan, Pemkab Bogor telah memberi teguran

keras bagi kru dan penanggung jawab produksi sinetron itu agar bisa mencegah kerumunan.

"Misalnya dengan memasang pagar pembatas yang tertutup. Itu sudah kami sampaikan dan ada pernyataan tertulis dari mereka. Kalau tidak mengatasi kerumunan maka akan kami tutup," tegas Agus.

Karena kata dia, nyawa manusia jauh lebih penting. Terlebih, pemerintah sedang melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi mengurangi penularan Covid-19.

"Intinya semua kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan. Ikuti semua aturan dalam masa pandemi ini. Kalau dari pihak sinetron tidak bisa memenuhi pernyataan yang sudah dibuat, terpaksa kami tutup," tegasnya. ● **gio**

Wedus Gembel Gunung Merapi, Ternyata Tembus Jarak 3,5 Km

YOGYAKARTA (IM)- Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menggunakan drone untuk melihat gambaran detail jarak luncur wedus gembel atau awan panas yang dikeluarkan Gunung Merapi selama erupsi.

Kepala BPPTKG, Hanik Humaida mengatakan, pihaknya melakukan validasi jarak luncur awan panas. Lantaran selama ini menggunakan dasar amplitudo dan juga durasi waktu sering dengan kecepatan rata-rata awan panas, maka dibutuhkan visual dengan ukuran jelas yakni menggunakan drone.

"Hasil foto udara menunjukkan jarak luncur awan panas pada 27 Januari 2021 mencapai 3,5 km untuk jarak miring atau 3,2 km jika dihitung jarak horizontal," katanya di Yogyakarta Jumat (29/1).

Dia menjelaskan, jarak luncur awan panas guguran masih dalam rekomendasi jarak bahaya yang telah ditetapkan, yaitu maksimum 5 km dari puncak Gunung Merapi. Saat ini awan

panas masih berpotensi terjadi di gunung api teraktif di Indonesia tersebut.

"Daerah yang berpotensi bahaya awan panas guguran dan guguran lava adalah alur Kali Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 km," tandasnya.

Hanik menambahkan, melihat kondisi Merapi maka erupsi eksplosif juga masih mungkin terjadi. Potensi bahaya erupsi eksplosif ini berupa lontaran material vulkanik dalam radius 3 km dari puncak.

Untuk itu masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya tersebut mengingat awan panas guguran dan lahar hujan dapat terjadi sewaktu-waktu.

"BPPTKG terus melakukan pemantauan aktivitas Gunung Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera kami tinjau kembali," katanya. ● **pra**